

# PERAN BAPPENAS DALAM MENDUKUNG PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Bangkit Ayatullah Datupalinge

NPP. 31.0856

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: bangkitaytllah8@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dedi Kusmana S.Sos, M.Si.

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** *As the National Capital, Jakarta currently feels less supportive of the running of government, because government activities are practically hampered by the problem of imbalance in public transportation facilities and flooding and clean water that occur everywhere. IKN was built in East Kalimantan as an alternative to moving the country's capital to avoid Java-centricity. Kalimantan was chosen as an alternative because it has the attractiveness of being an alternative capital, so on the other hand Jakarta now has a high attractiveness as the country's capital.* **Objective:** *The aim of this research is to analyze the extent to which Bappenas has prepared its role in supporting the relocation of the National Capital City. Method:* *This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach to describe the role of Bappenas based on the theory of Heroepoetri, Arimbi and Santosa, Mas Achmad. (2003) regarding its role as a policy, strategy, communication tool and conflict or issue resolution tool, and observed using observation, interview and documentation techniques. then the data obtained is analyzed through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.* **Results/Findings:** *The results of this research show that Bappenas has a role in overseeing, planning and budgeting the development of the National Capital as contained in Presidential Decree Number 39 of 2023 concerning National Development Risk Management (MRPN) which is a coordinated activity to direct and control MRPN entities in connection with there are risks to national development.* **Conclusion:** *Regional Directorate II as a partner of the National Capital Authority has a very important role in the annual planning and budgeting cycle for the development of the National Capital City. Finally, in terms of medium and long term planning, Bappenas has a role in ensuring the sustainability of the development of the National Capital by aligning the development agenda for the National Capital with the medium and long term national development agenda.* **Keywords:** *Role, Preparation for Relocation of the National Capital.*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Sebagai Ibukota Negara, Jakarta saat ini terasa kurang mendukung jalannya roda pemerintahan, sebab kegiatan pemerintahan praktis terhambat oleh permasalahan ketidakseimbangan sarana transportasi publik hingga banjir dan air bersih yang terjadi dimana-mana. IKN dibangun di Kalimantan Timur sebagai alternatif pemindahan ibukota negara untuk menghindari jawa-sentris. Kalimantan dipilih sebagai alternatif karena memiliki daya tarik keterpilihan ibukota alternatif, maka pada sisi lain Jakarta kini memiliki daya tolak yang tinggi sebagai ibukota negara. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauhmana Bappenas menyiapkan perannya dalam mendukung pemindahan Ibu Kota Negara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk mendeskripsikan peran Bappenas berdasarkan teori Heroepoetri, Arimbi dan Santosa, Mas Achmad.

(2003) mengenai peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi dan alat penyelesaian konflik atau isu, serta diamati menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. kemudian data yang di peroleh dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bappenas memiliki peran dalam pengawalan, perencanaan dan penganggaran pembangunan Ibu Kota Negara yang termuat dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2023 mengenai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. **Kesimpulan:** Direktorat Regional II sebagai mitra dari Otorita Ibu Kota Negara memiliki peran sangat penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Ibu Kota Negara. Terakhir dari sisi perencanaan menengah dan Panjang, Bappenas memiliki peran dalam hal memastikan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara dengan menyelaraskan agenda pembangunan Ibu Kota Negara dengan agenda pembangunan nasional jangka menengah dan Panjang. **Kata kunci:** Peran, Pemindahan Ibu Kota Negara.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara tentunya diatur oleh ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 24 menyebutkan bahwa Rencana kerja pemerintah (RKP) menetapkan penyiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota nusantara sebagai program prioritas nasional untuk jangka waktu minimal sepuluh tahun, terhitung sejak diundangkannya undang-undang ini atau sampai selesainya tiga tahap pembangunan yang digariskan. dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Sedangkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 Pasal 24 yang berubah menyebutkan bahwa persiapan paling singkat 10 tahun dengan memperhatikan pelaksanaan sesuai pasal 2 yaitu Visi dari IKN sampai dengan tahun 2045.

Usulan pemindahan ibu kota negara, seperti yang dikemukakan Tim Visi Indonesia 2033, tampaknya mendapat momentum melalui serangkaian diskusi dan perdebatan. Visi Indonesia 2033 berfokus pada wilayah Kalimantan sebagai potensi lokasi baru ibu kota dan menawarkan enam justifikasi utama atas keputusan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Labolo dan Toana (2022:17) yaitu: Secara geografis Kalimantan terletak di wilayah tengah Indonesia, dengan mobilitas demografi yang rendah dibandingkan wilayah Jawa; perekonomian Kalimantan memiliki sumber daya pertambangan dan energi yang cukup; sumber daya air, yang sangat penting bagi kehidupan, memiliki peluang terbaik untuk dimanfaatkan dengan baik selama komitmen pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara konsisten; secara demografis, Kalimantan merupakan wilayah yang paling sedikit penduduknya setelah Papua; Kalimantan merupakan wilayah dengan risiko bencana paling rendah; dan dari segi keadilan ekonomi, Kalimantan merupakan wilayah dengan pertumbuhan dan perputaran modal yang dianggap tidak adil dan tidak seimbang di Indonesia.

Sesuai Visi Indonesia 2045, atau Indonesia Maju, perekonomian Indonesia akan masuk lima besar dunia pada tahun 2045. PDB per kapita tahun ini diperkirakan sebesar \$23.119. Diperkirakan Indonesia akan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah pada tahun 2036. Oleh karena itu, pencapaian Visi Indonesia 2045 memerlukan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi akan didukung oleh industri hilir melalui pengenalan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan peraturan, dan reformasi birokrasi pada tahun 2020 hingga 2024. Oleh karena itu diperlukan suatu IKN yang dapat mendukung dan memfasilitasi perubahan ekonomi tersebut.



IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, termasuk di wilayah timur Indonesia. Selama ini Jakarta dan sekitarnya dianggap sebagai pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya, dan lain-lain) (Berawi, 2022). Tak heran jika peredaran uang di Jakarta mencapai 70 persen dan luas wilayahnya hanya 664,01 kilometer persegi atau 0,003 persen dari total luas wilayah Indonesia yang mencapai 1.919.440 kilometer persegi. Saat ini jumlah penduduknya mencapai 10,56 juta jiwa, atau setara dengan 3,9% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 270,2 juta jiwa. Hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan terkonsentrasi di Jakarta dan Pulau Jawa. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan berkelanjutan, potensi daerah tidak dimanfaatkan secara optimal, tidak memberikan kontribusi terhadap pemerataan daerah, dan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan IKN yang mampu menjawab tantangan tersebut, yaitu kota kelas dunia bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berbasis di Kalimantan, IKN diharapkan menjadi “pusat gravitasi” perekonomian baru Indonesia, termasuk wilayah tengah dan timur Tanah Air. IKN baru bertujuan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah (Agassi, 2021:58).

Kondisi objektif di Jakarta sudah tidak layak lagi untuk IKN. Hal ini terlihat dari “beban” yang harus ditanggung Jakarta berikut ini. Kemacetan lalu lintas Jakarta turun dari peringkat 10 kota terbesar di dunia pada tahun 2019 menjadi peringkat 31 dari 416 kota besar di 57 negara pada tahun 2020. Ada juga masalah lingkungan dan geologi yang serius, seperti banjir yang melanda Jakarta setiap tahun dan penurunan permukaan tanah yang menyebabkan sebagian wilayah Jakarta tenggelam di bawah permukaan laut. Pada dasarnya IKN dibangun di Kalimantan Timur sebagai alternatif pemindahan ibu kota provinsi untuk menghindari bias Jawa-sentris. Kalimantan dipilih sebagai kota alternatif karena mempunyai daya tarik sebagai ibu kota alternatif (faktor penting), sedangkan Jakarta saat ini mempunyai daya tarik yang tinggi sebagai ibu kota (alasan mendasar) (Chaniago, 2023:20).

Jakarta sebagai ibu kota, saat ini merasa dukungan terhadap tata kelola pemerintahan masih rendah, karena aktivitas pemerintah terhambat oleh ketidakseimbangan transportasi umum serta permasalahan banjir dan air bersih (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2006). Secara teknis, hal ini akan mempunyai dampak jangka panjang terhadap pelayanan pemerintah, pembangunan dan masyarakat (Mahmud, 2019:15). Dalam hal lain, Jakarta lebih seperti kota bisnis dibandingkan pusat pemerintahan. Hal ini ditandai dengan maraknya pembangunan pusat perbelanjaan dan apartemen yang menjadi pusat perkantoran dan berbagai fasilitas komersial dan semakin tersendat (Labolo dan Toana, 2022: 19).

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan tentu mempunyai pro dan kontra. Namun, jika suatu negara, sebagai negara demokrasi, memutuskan untuk mengesahkan IKN melalui proses demokrasi, maka semua sektor di negara tersebut harus mendukungnya. Negara Indonesia harus meminimalisir transfer IKN yang berlebihan. Tidak ada satu keputusan pun yang dapat memuaskan semua orang, namun keputusan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia harus didukung sebagai bentuk rasa cinta dan pengabdian kepada NKRI. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas) bertugas melaksanakan tugas nasional di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah rencana terkait persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Pada tahun 2021, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Direktorat Wilayah 2 Bapenas bekerja sama

dengan Otoritas Ibu Kota Nusantara untuk menyusun Rencana Induk IKN yang baru. Rencana induk terdiri atas rencana induk dan rencana rinci, rencana tapak dan rencana arsitektural, rencana prasarana dasar, rencana prasarana dasar, rencana kawasan inti pemerintah pusat, dan rencana kawasan IKN. Oleh karena itu, tahap perencanaan permintaan K/L yang digunakan pada IKN baru diharapkan dapat dimulai pada tahun 2020-2021.

Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ, Ph.D selaku Perencanaan Ahli Madya pada Direktorat Regional II mengatakan bahwa Bappenas memiliki Permasalahan terkait persiapan pemindahan dan pembangunan IKN. diantaranya masih adanya ego sektoral dan kurangnya koordinasi. selain itu dari sisi perencanaan perlunya melakukan mitigasi terhadap resiko perencanaan seperti masalah keterbatasan pendanaan, apalagi pembiayaan IKN itu dimuat dalam RPJMN yang esisten sekarang pada tahun 2020-2024. Kebutuhan untuk IKN senilai 456 Trilliun Rupiah, 20 persen dari APBN sisanya pihak swasta. 20 persen APBN itu sekitar 70-80 Trilliun Rupiah dan ini sudah digelontarkan melalui di Tahun 2022, 2023, 2024. sisanya sekitar 300 Trilliun Rupiah dari investor, sementara investor yang masuk baru 40 Trilliun Rupiah. Kemudian ia mengatakan lebih lanjut permasalahan persiapan dari sisi eksekusi perencanaan yaitu perlunya percepatan proses lelang ataupun penunjukan langsung, karena itulah yang menjadi kendala dari sisi perencanaan. Selain itu, ASN yang akan pindah sebanyak 60 ribu jiwa. hunian yang akan di bangun yaitu 1 tower terdiri dari 60 unit, 60 unit ini bisa menampung sekitar 1800 jiwa. Sementara pada tahun 2024 yang bisa di bangun hanya 47 tower dengan rincian 31 dari anggaran APBN, 16 itu dari anggaran KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), ternyata 47 yang telah direncanakan belum bisa terbangun akhirnya ditahun ini sampai dengan bulan Desember 2024 hanya bisa 27 Tower melalui kesepakatan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peran Bappenas maupun pemindahan Ibu Kota Negara. Penelitian Surya Dwi Saputra (2021) dengan judul penelitian “Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Indonesia)” DKI Jakarta hingga Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini antara lain, (1) tujuan mendasar dari relokasi KN Italia adalah pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan pertahanan negara; (2) fasilitas personel dan dukungan instansi terkait; Selain potensi besar yang dimiliki, kami juga menggandeng upaya relokasi IKN. Dukungan kebijakan dan program pembiayaan alternatif juga diperlukan untuk membantu mewujudkan transmisi IKN. (3) Cara/langkah yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga terkait, yaitu pembuatan kerangka kerja dan paket strategis tertentu, optimalisasi peluang dan kekuatan, antisipasi hambatan dan ancaman; Kesimpulannya, strategi yang diterapkan dalam upaya transfer IKN mendukung terwujudnya ekonomi pertahanan melalui pembentukan sistem IKN baru yang memiliki sarana pertahanan nirmiliter (*bargaining power*) dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umum. Penelitian Suryadi Jaya Purnama (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara”. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota penting dari segi pembiayaan/financing dan dampak ekonomi, termasuk kemungkinan kegagalan, dampak sosial-lingkungan dan pembelajaran dari beberapa negara, menunjukkan adanya hal tersebut keuntungan dan kerugian. Penulis mengelompokkannya menjadi driver dan inhibitor. Sebagai proyek publik berskala besar dan penting, pembangunan dan relokasi



IKN berpotensi menghadirkan dimensi ekonomi strategis dengan mencapai transformasi ekonomi dan Indonesia yang mengarah pada diversifikasi dan sinergi ekonomi. Namun potensi ekonominya masih tinggi dan perlu memperhatikan aspek sosiologis, geografis, dan geopolitik untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul. Rahmah Ramadhani (2022) yang berjudul “Upaya Pemerintah Indonesia Mengatasi Risiko Kerusakan Lingkungan Akibat Relokasi Ibu Kota”. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran IKN berdampak pada aspek ekonomi, politik, dan terutama aspek ekologi. Tekanan lingkungan hidup di Kalimantan Timur disebabkan oleh pembukaan lahan besar-besaran untuk pembangunan IKN, termasuk penggundulan hutan. Berdasarkan perspektif Keynesian, kontribusi pemerintah atau keberadaan negara ditujukan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan mengoptimalkan perekonomian. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi risiko perpindahan IKN sambil memanfaatkan sumber daya dan mencapai pemerataan adalah dengan membangun Inisiatif Hutan Kota.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran Bappenas dalam mendukung pemindahan ibu kota negara, metodenya yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif juga berbeda dengan penelitian Saputra, Purnama, maupun Ramadhani. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Arimbi Hereopoetri dan Mas Achmad Santosa (2003) yang mempunyai dimensi peran sebagai politik, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, dan pers sebagai instrumental. Menganalisis peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas dalam penyelesaian konflik.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran Bappenas dalam mendukung pemindahan ibu kota negara.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif (Sugiyono. 2017) untuk mendeskripsikan peran Bappenas berdasarkan teori Heroopoetri, Arimbi dan Santosa, Mas Achmad. (2003) mengenai peran sebagai kebijakan, strategi, alat komunikasi dan alat penyelesaian konflik atau isu, serta diamati menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Creswell (2014), pengertian analisis data adalah suatu proses berkelanjutan yang memerlukan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat selama penelitian. Menurut Sedarmayanti (2011) menjelaskan bahwa proses memilih permasalahan maupun sumber yang sama halnya dengan penelitian merupakan pengertian dari analisis data. Setelah data diperoleh dari berbagai sumber perlu dilakukan analisa terhadap data tersebut agar peneliti dapat mengetahui perbandingan guna mengetahui informasi mendasar serta menyajikan gambaran yang sesuai terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Biklen and Moseley dalam Yvonne Darlington and Dorothy Scott (2002) menyatakan bahwa “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memvalidasi atau membandingkannya dengan sesuatu selain data tersebut”. Pendapat Patton pada Moleong (2014) terdapat 4 ragam triangulasi yang mampu diimplementasikan dalam penelitian, yaitu: Triangulasi sumber, Triangulasi metode, Triangulasi peneliti dan Triangulasi teori.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisi data dan fakta ditemukan peneliti selama pelaksanaan di lapangan. Hal ini mengacu pada rumusan masalah penelitian ini, yakni sejauhmana peran peran Bappenas dalam mendukung pemindahan ibu kota negara.

#### 3.1 Peran Bappenas Dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara.

Peran Bappenas dalam pemindahan ibu kota negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah berperan dalam pengawalan perencanaan pembangunan dan pengawalan penganggaran. Untuk menjawab rumusan masalah maka penulis mengacu pada teori Heroepoetri, Arimbi dan Santosa, Mas Achmad. (2003) diantaranya: Peran sebagai strategi; Peran sebagai kebijakan; Peran sebagai alat komunikasi; Peran sebagai penyelesaian konflik atau isu. Berikut penjelasan tentang Peran Bappenas dengan teori menurut teori Heroepoetri, Arimbi dan Santosa, Mas Achmad. (2003) yang dijabarkan melalui wawancara dengan keempat informan dalam indikator berikut:

##### 3.1.1 Peran Sebagai Kebijakan

###### 3.1.1.1 Kerjasama (Mitra)

Kerjasama (mitra) Bappenas dalam pemindahan Ibu Kota Negara Bappenas adalah mitra dari Otorita Ibu Kota Negara atau OIKN mempunyai peranan yang sangat penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Ibukota Nusantara. yakni, mengkoordinasikan dukungan perencanaan dan penganggaran pembangunan ibu kota nusantara, melakukan pengawalan terhadap kegiatan rapat rapat koordinasi yang intensif dilaksanakan serta menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan memastikan alokasi anggaran untuk pembangunan tersedia.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan dengan Bapak Anang Budi Gunawan selaku Perencanaan Ahli Madya pada Direktorat Regional II menyatakan bahwa: Bapenas berperan penting dalam merumuskan kebijakan baik dalam perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas terlibat dalam penyusunan berbagai kajian persiapan pemindahan ibu kota Indonesia dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. : Memberikan berbagai pilihan untuk mempertimbangkan tempat pemindahan ibu kota negara. Bapenas juga berperan penting sebagai inisiator dalam penyusunan dan pemantauan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan peraturan turunan penting lainnya. Saat ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas memainkan peran kebijakan dalam mengawasi perencanaan dan penganggaran pembangunan ibu kota Indonesia. Sebagai mitra Otoritas Ibu Kota Nusantara, Ditjen Daerah II mempunyai peranan yang sangat penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Ibukota Nusantara. yakni, mengkoordinasikan dukungan perencanaan dan penganggaran pembangunan ibu kota nusantara. Terakhir, dari perspektif perencanaan jangka menengah dan panjang, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas berperan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ibu kota nusantara dengan mengintegrasikan agenda pembangunan dan perencanaan jangka menengah dan panjang ibukota nusantara. Tantangan pembangunan nasional mewujudkan keselarasan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Mutia Vegadianti selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Direktorat Regional II melakukan pengawalan dalam perencanaan dan penganggaran OIKN. Sebagai mitra, proses penyusunan Renja, Renstra, hingga integrasi pelaksanaan pembangunan IKN oleh pemerintah yang masuk ke dalam RKP juga dikoordinasikan



oleh Dit Regional II. Selain melakukan pengawalan dalam rapat-rapat koordinasi yang secara intensif dilaksanakan, Dit Regional II juga mendukung proses pengembangan daerah sekitar IKN dengan melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah Korea dan Jepang.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zulhamdi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Peran yang sangat penting. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 mengatur pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta memperkuat peran Otoritas IKN yang didukung lintas sektor, termasuk peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan IKN.

Yang terakhir peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Raditya Pranadi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Bappenas melalui Direktorat Regional II saat ini berperan dalam mengawal terlaksananya pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai perencanaan dan memastikan ketersediaan alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan.

### **3.1.1.2 Tanggung Jawab**

Bappenas bertanggung jawab untuk Menyusun rencana induk ibu kota nusantara bekerjasama dengan kementerian/lembaga lain sehingga disusun rencana induk ibu kota nusantara. Hal ini merupakan lampiran dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan dirinci dalam Perpres Nomor 63. serta pengawalan dan pendampingan pada setiap proses pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Hasil wawancara dengan Bapak Anang Budi Gunawan selaku Perencanaan Ahli Madya pada Direktorat Regional II menyatakan bahwa: Tanggung jawab persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota Indonesia pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, dengan berbagai kementerian dan lembaga berbagi tugas sesuai misi dan fungsinya masing-masing. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mempunyai tugas yang sangat penting yaitu mengkoordinasikan pembentukan lokasi relokasi dan pertimbangan kebijakan pembangunan, sebagai permulaan penyiapan dan penyiapan lokasi pemindahan ibu kota provinsi. Menyusun rencana induk ibu kota nusantara bekerjasama dengan kementerian/lembaga lain sehingga disusun rencana induk ibu kota nusantara. Hal ini merupakan lampiran dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan dirinci dalam Perpres Nomor 63. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Rencana Induk Ibu Kota Pulau tahun 2023. Saat ini tugas pokok koordinasi penyiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota nusantara menjadi tanggung jawab Badan Ibu Kota Kepulauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan amanah dan fungsinya mengenai sinkronisasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, khususnya dalam rangka pembangunan sebagai salah satu ibu kota nusantara. Prioritas pembangunan nasional.

Hasil wawancara dengan Ibu Mutia Vegadianti selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Pelaksanaan 4P IKN saat ini sudah menjadi tanggung jawab dan kewenangan OIKN, Bappenas sebagai mitra melakukan pengawalan dan pendampingan dalam prosesnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Zulhamdi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Sangat bertanggung jawab. Pembangunan IKN merupakan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024, salah satu tema adan arahan kebijakan dalam RKP 2024, sekaligus upaya transformasi super prioritas (game changer) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Hasil wawancara dengan Bapak Raditya Pranadi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Bappenas bertanggung jawab dalam proses perencanaan di awal.

### **3.1.1.3 Koordinasi**

Koordinasi yang telah dilakukan Bappenas yaitu koordinasi lintas sektor yang dilakukan bersama sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara pada tahun ini dilakukan inisiasi Monev Terintegrasi IKN yang tidak hanya untuk memantau pembangun fisik di IKN tapi juga memastikan pencapaian KPI IKN.

Hasil wawancara dengan Bapak Anang Budi Gunawan selaku Perencanaan Ahli Madya pada Direktorat Regional II menyatakan bahwa: Sejauh ini koordinasi lintas sektor dalam hal Pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah cukup baik. Beberapa kementerian yang relatif memiliki peranan penting dalam tahapan awal pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara bersinergi dengan baik. Peran Bappenas dalam koordinasi lintas sektor lebih banyak dilakukan bersama-sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara yang memiliki tugas dan fungsi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kendala-kendala diawal-awal koordinasi adalah pada konteks belum lengkapnya struktur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara dengan tim yang ada di bawahnya sehingga dalam melakukan koordinasi masih banyak harus dilakukan dengan Kementerian Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait. Namun demikian, saat ini dengan struktur yang mulai lengkap, maka kendala dalam koordinasi perencanaan semakin berkurang, koordinasi dengan lintas sektoral mulai dilakukan bersama-sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk memastikan keberlanjutan dan menyelesaikan debottlenecking isu-isu ada dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Hasil wawancara dengan Ibu Mutia Vegadianti selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Koordinasi lintas sektor dilakukan berdasarkan permasalahan/kendala yang dihadapi, tahun 2024 dilakukan inisiasi Monev Terintegrasi IKN yang tidak hanya untuk memantau pembangun fisik di IKN tapi juga memastikan pencapaian KPI IKN.

Hasil wawancara dengan Bapak Zulhamdi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Tidak terdapat kendala. Bappenas bersama Otorita IKN dalam mendukung percepatan pembangunan IKN melakukan multilateral meeting dengan mengundang seluruh kementerian/lembaga yang terlibat untuk mengetahui rincian output (proyek) yang mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Nanti, di Bappenas akan ditagging pada sistem Krisna untuk mengetahui jumlah anggaran dan target dalam persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara.

Hasil wawancara dengan Bapak Raditya Pranadi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Koordinasi lintas sektor telah dilakukan cukup intensif. Kendala yang paling sering dihadapi adalah mengenai isu kewenangan (siapa yang membangun apa) serta ego sektoral (masih terdapat beberapa K/L yang merencanakan pembangunan tanpa koordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan Bappenas).

### **3.1.1.4 Perincian Regulasi**

Perincian regulasi yang telah dilakukan Bappenas meliputi Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022, Rencana Induk Ibu Kota ini digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan Ibu Kota Negara, Sebagai salah satu proses dalam mendukung pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Hasil wawancara dengan Bapak Anang Budi Gunawan selaku Perencanaan Ahli Madya pada Direktorat Regional II menyatakan bahwa: Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 menjadi bagian yang sangat penting dalam melakukan rujukan dalam perumusan kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara.



Key Performance indicators (KPI) yang tertuang dalam Rencana Induk menjadi bagian yang diacu oleh Otorita Ibu Kota Nusantara serta berbagai Kementerian Lembaga dalam mempersiapkan Ibu Kota Nusantara. Sebagai contoh, KPI terkait dengan 65% kawasan hijau dan 10 % kawasan area pangan menjadi bagian yang sangat penting dalam menentukan area di Ibu Kota Nusantara yang dapat dibangun dan tidak dapat dibangun. Bahkan, dalam berbagai diskusi kebijakan, Kementerian Lembaga terus mengacu pada arahan konsep pengembangan regional dalam melakukan desain bangunan dan desain kebijakan, diantaranya konsep pengembangan kota IKN sebagai forest city, sponge city dan smart city.

Hasil wawancara dengan Ibu Mutia Vegadianti selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Renduk menjadi rujukan utama dan dasar dalam proses 4P IKN, sehingga setiap perencanaan pembangunan yang terkait dengan IKN selalu mengacu pada Renduk IKN.

Hasil wawancara dengan Bapak Zulhamdi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Sebagai tonggak dalam pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Induk menjadi salah satu fokus bagi Bappenas dengan menetapkannya sebagai lampiran dari Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN serta peraturan turunannya (Peraturan Presiden). Sebagai salah satu proses dalam mendukung pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dilakukan pemutakhiran penyusunan Rencana Induk sebagai perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara melalui koordinasi teknis lintas kementerian atau lembaga dengan mengintegrasikan dengan dokumen perencanaan lainnya (RTR KSN IKN, Urban Design KIPP, dan rencana induk sektoral). Lampiran Perincian Rencana Induk IKN disusun untuk dapat dikembangkan atau dirincikan oleh Otorita IKN maupun setiap K/L yang akan menjadi pelaksana pembangunan IKN. Perincian Rencana Induk IKN juga mencantumkan indikator kinerja utama (KPI) untuk tahun 2045 yang perlu diacu dan dicapai dalam setiap aspek pembangunan. Rincian 5 Tahap pembangunan juga dituliskan menurut KPI dan aspek pembangunannya berikut: langkah persiapan yang perlu dilaksanakan untuk membantu pencapaian KPI. Dengan perencanaan yang komprehensif dan inheren, Lampiran Perincian Rencana Induk IKN diharapkan dapat menjadi dasar yang kokoh, namun tetap memberi fleksibilitas bagi pelaksana pembangunan untuk melakukan pengembangan.

Hasil wawancara dengan Bapak Raditya Pranadi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sudah sangat menjadi rujukan bagi semua kementerian/lembaga dalam melaksanakan pembangunan di Ibu Kota Nusantara.

### **3.1.2 Peran Sebagai Strategi**

#### **3.1.2.1 Upaya Mitigasi Risiko**

Upaya Mitigasi Risiko yang disiapkan oleh Bappenas untuk mengurangi dan menghindari berbagai risiko yang muncul dalam upaya mendukung pemindahan Ibu Kota Negara yaitu dengan mengesahkan Perpres Nomor 39 Tahun 2023 yang mengenai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional dimana Bappenas sebagai ketua atau penanggung jawab penuh. Hal ini ditegaskan kembali dengan adanya hasil wawancara dengan beberapa informan.

Hasil wawancara dengan Bapak Anang Budi Gunawan selaku Perencanaan Ahli Madya pada Direktorat Regional II menyatakan bahwa: Bappenas pada saat penyiapan pemindahan Ibu Kota Negara sampai dengan penyusunan peraturan perundangan yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara telah membentuk berbagai kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari berbagai unit lintas kerja di Bappenas dan lintas Kementerian /Lembaga. Pada saat itu, Pokja tersebut selain

bertugas sebagai bagian dari perumusan kebijakan penyiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara juga bertugas dalam hal melakukan mitigasi risiko pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pada saat ini, Bappenas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, terus melakukan berbagai upaya pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional yang juga merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko. Sebagai tambahan, berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2023 yang mengenai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Dalam hal ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi ketua MRPN. Mengingat bahwa Pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi bagian dari pembangunan nasional, maka Pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko.

Hasil wawancara dengan Ibu Mutia Vegadianti selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Renduk menjadi rujukan utama dan dasar dalam proses 4P IKN, sehingga setiap perencanaan pembangunan yang terkait dengan IKN selalu mengacu pada Renduk IKN.

Hasil wawancara dengan Bapak Zulhamdi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Dalam melaksanakan mitigasi, saat ini yang dilakukan Bappenas khususnya Direktorat Regional II adalah melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan (triwulan) untuk mengetahui progres proyek-proyek yang mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara bersama Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.

Hasil wawancara dengan Bapak Raditya Pranadi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Forum koordinasi rutin dan instrumen monitoring evaluasi seperti dashboard bersama

### **3.1.2.2 Upaya dan Strategi**

Upaya dan strategi yang telah disiapkan oleh Bappenas yaitu melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pembangunan Ibu Kota Negara, serta mendorong Otoritas Ibu Kota Negara dalam memastikan alokasi anggaran terhadap pembangunan. Hal ini ditegaskan kembali dengan adanya hasil wawancara dengan beberapa informan.

Hasil wawancara dengan Bapak Anang Budi Gunawan selaku Perencanaan Ahli Madya pada Direktorat Regional II menyatakan bahwa: Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsinya terus memastikan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara melalui kegiatan pengendalian dan evaluasi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam kaitannya dengan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Bappenas juga melakukan koordinasi perencanaan yang intensif dengan Bappeda Provinsi, Kota dan Kabupaten di Kalimantan Timur pada khususnya, serta wilayah Kalimantan dan Sulawesi pada umumnya untuk mencari berbagai potensi kolaborasi dan sinergi yang dapat dilakukan dengan Otorita Ibu Kota Nusantara. Upaya dan strategi lainnya adalah mempercepat pengembangan Superhub Ekonomi Nusantara yang berupa pengembangan kawasan-kawasan strategis ekonomi seperti kawasan industri dan pariwisata dengan berbagai mitra pembangunan.

Hasil wawancara dengan Ibu Mutia Vegadianti selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Koordinasi intensif penyelesaian permasalahan yang dihadapi serta percepatan proses dalam mendukung Pembangunan IKN. Bappenas sedang menyiapkan Monev Terintegrasi IKN yang melibatkan seluruh sektor di Bappenas, OIKN, dan K/L lain yang terkait.

Hasil wawancara dengan Bapak Zulhamdi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Bappenas melakukan koordinasi intensif dengan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) maupun stakeholder terkait dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Bappenas mendorong dan membantu Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai organisasi kelembagaan pelaksana pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam melakukan proses koordinasi penyiapan anggaran (termasuk pencarian sumber pembiayaan kreatif dan investasi) agar rencana



pelaksanaan pembangunan yang lebih masif untuk tahun selanjutnya melalui penargetan beberapa proyek strategis dan penting dapat terbangun sebelum Agustus 2024 (target pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara).

Hasil wawancara dengan Bapak Raditya Pranadi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Bappenas selalu berupaya memastikan kelancaran pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui pengalokasian anggaran untuk proyek-proyek di Ibu Kota Nusantara.

### **3.1.3 Peran Sebagai Alat Komunikasi**

#### **3.1.3.1 Komunikasi Kebijakan**

Bappenas melakukan komunikasi kebijakan dilakukan melalui berbagai forum-forum pertemuan dengan pemangku kepentingan, konsultasi publik, serta berbagai seminar yang mengundang masyarakat umum dan akademisi. Hal ini ditegaskan kembali dengan adanya hasil wawancara dengan beberapa informan.

Hasil wawancara dengan Bapak Anang Budi Gunawan selaku Perencanaan Ahli Madya pada Direktorat Regional II menyatakan bahwa: Komunikasi terkait dengan rencana dan perkembangan Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Bappenas, khususnya sebelum terbentuknya Otorita Ibu Kota Nusantara. Bappenas banyak melakukan diskusi terkait pemindahan dengan berbagai pemangku kepentingan baik dari akademisi, tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan daerah. Saat ini, komunikasi kebijakan terus lebih banyak dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, Bappenas melakukan komunikasi kebijakan dilakukan melalui berbagai forum-forum pertemuan dengan pemangku kepentingan, konsultasi publik, serta berbagai seminar yang mengundang masyarakat umum dan akademisi. Selain itu, komunikasi kebijakan juga dilakukan oleh kementerian / lembaga melalui koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Hasil wawancara dengan Ibu Mutia Vegadianti selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Partisipasi aktif selalu dilakukan dalam berbagai kesempatan seperti konsultasi publik, sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, serta kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk mengkomunikasikan arah kebijakan terkait 4P IKN.

Hasil wawancara dengan Bapak Zulhamdi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Sangat berperan, dalam merumuskan kebijakan Bappenas selalu berdiskusi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pemilik kegiatan pembangunan Ibu Kota Nusantara agar kebijakannya selaras dengan kondisi di lapangan.

Hasil wawancara dengan Bapak Raditya Pranadi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Pada masa awal perencanaan sebelum adanya Otorita Ibu Kota Nusantara, Bappenas memiliki peran sangat aktif untuk mengomunikasikan kebijakan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pasca terbentuknya lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara, komunikasi kebijakan banyak dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### **3.1.3.2 Komunikasi Hambatan**

Bappenas memiliki hambatan yang dihadapi dalam komunikasi adalah kadang data yang disediakan masih kurang update. karena banyak data yang bergerak dan melibatkan banyak sektor, Sehingga kami di Regional II perlu crosscheck kembali dengan Direktorat Sektor di Bappenas yang ikut terlibat dalam percepatan pembangunan IKN. Hal ini ditegaskan kembali dengan adanya hasil wawancara dengan beberapa informan.

Hasil wawancara dengan Bapak Anang Budi Gunawan selaku Perencanaan Ahli Madya pada Direktorat Regional II menyatakan bahwa: Dalam melakukan koordinasi termasuk dalam hal pertukaran data dan informasi, sering terjadi berbagai hambatan terutama dalam hal data inteoperability. Hal ini mengingat beberapa data dikategorikan sebagai data yang bersifat rahasia

dan tidak data disebarluaskan secara umum. Hal lainnya yang menjadi isu adalah terkait dengan pemutakhiran data yang tidak diinformasikan secara luas kepada para pemangku kepentingan sehingga menyebabkan perumusan kebijakan sektoral sesuai tugas dan fungsinya masih menggunakan informasi sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Mutia Vegadianti selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Proses pembangunan IKN yang sangat cepat memerlukan koordinasi yang intensif karena data yang ada bergerak dengan sangat cepat dan melibatkan banyak sektor. Diperlukan dashboard monev bersama untuk mengetahui progres pembangunan IKN secara realtime

Hasil wawancara dengan Bapak Zulhamdi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Dikarenakan saat ini OIKN sudah menjadi lembaga sendiri. hambatan yang dihadapi dalam komunikasi adalah kadang data yang disediakan masih kurang update. Sehingga kami di Regional II perlu crosscheck kembali dengan Direktorat Sektor di Bappenas yang ikut terlibat dalam percepatan pembangunan IKN.

Hasil wawancara dengan Bapak Raditya Pranadi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Ego sektoral dan kerahasiaan data sehingga data dan informasi yang dimiliki kementerian atau lembaga seringkali tidak dapat dibagipakaikan.

### **3.1.4 Peran sebagai penyelesaian Isu atau Sengketa**

#### **3.1.4.1 Identifikasi Isu atau sengketa**

Bappenas menanggapi beberapa Isu-isu yang dirangkul terkait dengan isu kelembagaan organisasi, isu pemindahan ASN. pemindahan pada Tahun 2024 ke Ibu Kota Nusantara akan dilaksanakan 3 kali tahapan pemindahan yaitu di bulan Juni, September dan November. isu terkait mitra IKN, isu pembangunan fisik, isu sosial serta isu lingkungan. isu-isu tersebut diperoleh melalui berbagai proses diskusi yang FGD yang rutin dilakukan oleh Bappenas di berbagai unit kerja. Hal ini ditegaskan kembali dengan adanya hasil wawancara dengan beberapa informan.

Hasil wawancara dengan Bapak Anang Budi Gunawan selaku Perencanaan Ahli Madya pada Direktorat Regional II menyatakan bahwa: Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Bappenas memiliki fungsi melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional sehingga dalam konteks tersebut selalu merumuskan berbagai isu-isu strategis dalam pembangunan baik sifatnya sektoral maupun kewilayahan. Isu-isu yang dirangkul terkait dengan isu kelembagaan organisasi, isu pemindahan ASN, isu terkait mitra IKN, isu pembangunan fisik, isu sosial serta isu lingkungan. isu-isu tersebut diperoleh melalui berbagai proses diskusi yang FGD yang rutin dilakukan oleh Bappenas di berbagai unit kerja.

Hasil wawancara dengan Ibu Mutia Vegadianti selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Ya, melalui proses koordinasi, surat-surat yang disampaikan oleh berbagai pihak seperti Pemda dan Swasta, serta peninjauan langsung di lapangan. Misalnya isu terkait pelayanan masyarakat daerah asal.

Hasil wawancara dengan Bapak Zulhamdi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Bappenas memiliki peran. Salah satunya isu terkait pemindahan ASN pada Tahun 2024 ke Ibu Kota Nusantara dikarenakan pada Tahun 2024 akan dilaksanakan 3 kali tahapan pemindahan yaitu di bulan Juni, September dan November. Pemindahan ASN ini didukung dengan rencana pelaksanaan Upacara Kemedederkaan pada bulan agustus di Ibu Kota Nusantara.

Hasil wawancara dengan Bapak Raditya Pranadi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Bappenas masih memiliki peran membantu Otorita Ibu Kota Nusantara untuk memecahkan masalah (debottlenecking) terhadap isu-isu yang dihadapi karena ruang lingkup koordinasinya yang bisa menjangkau kementerian/lembaga multisektor. Salah satu instrument yang digunakan seringkali adalah melalui forum multipihak (multilateral meeting).



Isu-isu yang berkembang terkait dengan rencana persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara dan memerlukan peran strategis Bappenas dalam penyelesaiannya. Hasil wawancara dengan Bapak Anang Budi Gunawan selaku Perencanaan Ahli Madya pada Direktorat Regional II menyatakan bahwa: Berbagai isu strategis yang coba dirangkum oleh Bappenas yaitu meliputi isu kelembagaan organisasi, isu pemindahan ASN, isu terkait mitra IKN, isu pembangunan fisik, isu sosial serta isu lingkungan. Dari keseluruhan isu strategis tersebut, Bappenas memiliki peran di seluruh isu yang ada. Hal ini dikarenakan Bappenas memiliki unit kerja yang sifatnya lintas sektor sehingga peran Bappenas sangat penting dalam menyelesaikan isu strategis tersebut.

Hasil wawancara dengan Ibu Mutia Vegadianti selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Pengembangan daerah mitra, pelayanan masyarakat, pembagian wilayah, dan pencapaian KPI Pembangunan IKN sesuai Renduk

Hasil wawancara dengan Bapak Zulhamdi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Salah satu isu yang memerlukan peran strategis Bappenas adalah sinkronisasi pelaksanaan perencanaan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dengan kebutuhan pembangunan di Tahap I (tahun 2022-2024); dan penyelesaian gap antara estimasi kebutuhan pembiayaan perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Hasil wawancara dengan Bapak Raditya Pranadi selaku Staff Bappenas menyatakan bahwa: Pembiayaan, proses pemindahan ASN dan TNI/POLRI, serta pembangunan di sektor hankam.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

#### **3.2.1 Peran Sebagai Kebijakan**

Bappenas memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dalam konteks perencanaan baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Bappenas memiliki peran dalam merumuskan berbagai kajian penyiapan pemindahan Ibu Kota Nusantara baik dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan termasuk dalam memberikan berbagai opsi pertimbangan lokasi pemindahan ibu kota negara. Bappenas juga memiliki peranan penting sebagai pemrakarsa dalam penyusunan dan pengawalan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta berbagai peraturan turunan penting lainnya. Saat ini, dalam hal kebijakan, Bappenas memiliki peran dalam pengawalan perencanaan dan penganggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara. Direktorat Regional II sebagai mitra dari Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki peran sangat penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Ibu Kota Nusantara, yaitu mengkoordinasikan dukungan-dukungan perencanaan dan penganggaran dari Pembangunan Ibu Kota Nusantara serta menyusun master plan Ibu Kota Nusantara. Hal ini didukung hasil wawancara, observasi dan analisis penelitian yang peneliti lakukan dengan keempat informan menggunakan indikator teori dari Heroepoetri, Arimbi dan Santosa, Mas Achmad. (2003)

#### **3.2.2 Peran Sebagai Strategi**

Peran strategi Bappenas pada saat penyiapan pemindahan Ibu Kota Negara sampai dengan penyusunan peraturan perundangan yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara telah membentuk berbagai kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari berbagai unit lintas kerja di Bappenas dan lintas Kementerian /Lembaga. Pada saat itu, Pokja tersebut selain bertugas sebagai bagian dari perumusan kebijakan penyiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara, memberikan arahan, panduan dan kendali terhadap tim konsultan juga bertugas dalam hal melakukan mitigasi risiko pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pada saat ini, Bappenas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, terus melakukan berbagai upaya pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional yang juga merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko. salah satu upaya mitigasi resiko yang dilakukan adalah adanya Perpres Nomor

39 Tahun 2023 yang mengenai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Hal ini didukung hasil wawancara, observasi dan analisis penelitian yang peneliti lakukan dengan keempat informan menggunakan indikator teori dari Heroepoetri, Arimbi dan Santosa, Mas Achmad. (2003)

### **3.2.3 Peran Sebagai Alat Komunikasi**

Peran sebagai alat komunikasi, Komunikasi terkait dengan rencana dan perkembangan Pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan oleh Bappenas, khususnya sebelum terbentuknya Otorita Ibu Kota Nusantara. Bappenas banyak melakukan diskusi terkait pemindahan dengan berbagai pemangku kepentingan baik dari akademisi, tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan daerah. Saat ini, komunikasi kebijakan terus lebih banyak dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, Bappenas melakukan komunikasi kebijakan dilakukan melalui berbagai forum-forum pertemuan dengan pemangku kepentingan, konsultasi publik, serta berbagai seminar yang mengundang masyarakat umum dan akademisi. Selain itu, komunikasi kebijakan juga dilakukan oleh kementerian / lembaga melalui koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini didukung hasil wawancara, observasi dan analisis penelitian yang peneliti lakukan dengan keempat informan menggunakan indikator teori dari Heroepoetri, Arimbi dan Santosa, Mas Achmad. (2003)

### **3.2.4 Peran sebagai penyelesaian Isu atau Sengketa**

Peran sebagai penyelesaian konflik, peran sebagai penyelesaian sengketa atau isu maka. Bappenas memiliki fungsi melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan nasional sehingga dalam konteks tersebut selalu merumuskan berbagai isu-isu strategis dalam pembangunan baik sifatnya sektoral maupun kewilayahan. Isu-isu yang dirangkul terkait dengan isu kelembagaan organisasi, isu pemindahan ASN, isu terkait mitra IKN, isu pembangunan fisik, isu sosial serta isu lingkungan. isu-isu tersebut diperoleh melalui berbagai proses diskusi yang FGD yang rutin dilakukan oleh Bappenas di berbagai unit kerja. Salah satu hasil dari FGD yang dilakukan dengan BRIN yaitu penyempurnaan sistem smart defense yaitu sistem pertahanan negara yang mensinergikan pertahanan militer dan nirmiliter yakni konsep yang mengedepankan diplomasi dan memadukan perkembangan teknologi, melalui pemanfaatan industri pertahanan nasional. Hal ini didukung hasil wawancara, observasi dan analisis penelitian yang peneliti lakukan dengan keempat informan menggunakan indikator teori dari Heroepoetri, Arimbi dan Santosa, Mas Achmad. (2003)

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran Bappenas dalam melaksanakan pemindahan ibu kota negara hanya sebatas pengawalan perencanaan pembangunan dan pengawalan penganggaran. hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Perpres Nomor 39 Tahun 2023 mengenai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Direktorat Regional II sebagai mitra dari Otorita Ibu Kota Negara memiliki peran sangat penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Ibu Kota Negara. Terakhir dari sisi perencanaan menengah dan Panjang, Bappenas memiliki peran dalam hal memastikan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara dengan menyelaraskan agenda pembangunan Ibu Kota Negara dengan agenda pembangunan nasional jangka menengah dan Panjang.



**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan berdasarkan pendapat dari Arimbi Hereopoetri dan Mas Achmad Santosa.

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Bappenas dalam mendukung pemindahan ibu kota negara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pimpinan Bappenas beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agassi, Ecky. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemindahan Ibukota Negara. Skripsi. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Bogor.
- Berawi, Ali, 2022. *Ibukota Negara Berkelanjutan*. Jakarta: Kompas, 12 Januari 2022.
- Chaniago, Andrinof. 2023. *6 Alasan Pindah Ibukota Versi Tim Visi Indonesia 2033*, Tim Visi Indonesia, Jakarta.
- Creswell, 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heroopoetri, Arimbi dan Santosa, Mas Achmad. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. 2006. *Pedoman Umum GCG Indonesia*, Jakarta: KNKG.
- Labolo dan Toana. 2022. *Relokasi Ibukota Negara (Studi Alternatif)*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Mahmud, 2019. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purnama, Suryadi Jaya. 2022. *Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 13 (2), 2022. DOI: 10.22212/jekp.v13i1.2155
- Ramadhani, Rahmah. 2022. *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Resiko Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara*. Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional. Volume 1 No. 3, Desember 2022. DOI: 10.24198/aliansi.v1i3.44008
- Saputra, Surya Dwi. 2021. *Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan. Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara*. Jurnal Ekonomi Pertahanan. Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021. DOI: 10.33172/JPBH.V3I1.373
- Sedarmayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : Rafika Aditama
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Yvonne Darlington and Dorothy Scott. 2002. *Qualitative Research in Practice Stories from the Field*. Singapore: South Wind Productions.